

PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT (Studi di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung)

LAILY PURNAWATI
lailypurnawatisip@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu merupakan bagian bentuk nyata pendidikan, meskipun rutin kejadiannya tapi berjangka waktu cukup panjang. Frekuensi pemilihan di banyak negara sekali dalam lima tahun atau empat tahun, dianggap sudah cukup masa tersebut untuk membuktikan kesanggupan dan *pushing power* (tenaga pendobrak) untuk menyusun suatu masa depan yang lebih baik dan membahagiakan rakyat.

Pemilu di Indonesia dipandang juga sebagai wahana pendidikan politik yang dapat dipakai sebagai indikator sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dibidang politik. Pendidikan politik yang dimaksudkan meliputi sedikit banyaknya informasi masalah-masalah kenegaraan yang diterima masyarakat.Selanjutnya, pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat melalui dua cara penyampaian, implisit dan eksplisit. Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif dan mengambil lokasi di kabupaten Tulungagung. Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi politik di kabupaten Tulungagung.

Kata Kunci :Pendidikan Politik, Sosialisasi Politik, Kabupaten Tulungagung

ABSTRACT

Elections are part of the real form of education, although it is routine but has a long term. The frequency of elections in many countries once in five years or four years, is considered to have been enough to prove the ability and pushing power to develop a better and happier future for the people.

Elections in Indonesia are also seen as a vehicle for political education that can be used as an indicator of the extent of the level of public participation in the political field. Political education is intended to include a little information about state issues that are accepted by society. Furthermore, political education is accepted by society through two ways of conveying, implicit and explicit. The research used is a qualitative descriptive research type and takes place in the Tulungagung district. This research will examine how political socialization to increase public awareness and factors that can influence the implementation of political socialization in Tulungagung district.

Keywords:Political Education, Political Socialization, Tulungagung Regency

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya masih merasa *apriori* jika membicarakan politik. Masyarakat selalu berpikir mengenai politik dengan sesuatu yang kotor, jahat dan menakutkan. Sehingga masyarakat tak berani menyentuhnya, apalagi berkiprah didalamnya. Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika masyarakat telah menyadari bahwa sebenarnya mereka ikut pula menentukan kehidupan negara, yang notabene adalah keikutsertaan mereka dalam kehidupan politik.

Di dalam kehidupan bermasyarakat memang tidak semua orang mampu berperan aktif didalamnya. Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik adalah mereka yang mengenyam pendidikan sekolah, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan aktif berorganisasi. Dengan bekal pendidikan orang menjadi sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai warga suatu negara. Tetapi inipun tidak cukup bila tanpa dibarengi dengan pemberian kesempatan untuk memperjuangkan dan mempertahankan haknya secara demokratis tanpa mengabaikan kewajiban. Sebab sering terjadi, orang terlalu menuntut hak dan mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya.

Pembangunan disegala bidang menghendaki partisipasi masyarakat, sebab hasilnya nanti akan dinikmati juga. Usaha-usaha yang biasanya dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik ada bermacam-macam. Usaha tersebut antara lain adanya sejumlah kecil negara berkembang yang memperkenankan adanya partai oposisi, ada pula yang meluluskan adanya pemilu yang bebas bersaing dimana para pemilih diberikan kesempatan untuk memilih pelbagai calon yang berbeda pandangan.

Pasca-reformasi, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Pada Pilpres 2019 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen.

Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tak menggunakan hak pilihnya.

(<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/0211249/KPU>)

Memang sulit suatu negara untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan politik yang sehat dan dapat berhasil menumbuhkan partisipasi politik masyarakat, tanpa mengorbankan stabilitas nasional.

Pemilu di Indonesia dipandang juga sebagai wahana pendidikan politik yang dapat dipakai sebagai indikator sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dibidang politik. Karena jumlah suara yang diperoleh akan menentukan jumlah wakil-wakil rakyat dalam MPR, untuk selanjutnya akan memilih presiden yang akan menyelenggarakan roda pemerintahan.

Pemilu merupakan bagian bentuk nyata pendidikan, meskipun rutin kejadiannya tapi berjangka waktu cukup panjang. Frekuensi pemilihan di banyak 57ransf sekali dalam lima tahun atau empat tahun, dianggap sudah cukup masa tersebut untuk membuktikan kesanggupan dan *pushing power* (tenaga pendobrak) untuk menyusun suatu masa depan yang lebih baik dan membahagiakan rakyat.

Secara nasional pemilu 2014 berhasil dengan sukses, dalam arti berjalan dengan tertib, aman, bebas,

rahasia, jujur dan adil. Hal tersebut berkat dukungan semua daerah pemilihan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk daerah pemilihan Kabupaten Tulungagung.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2014 diKabupaten Tulungagung ini, berkat kerja sama terpadu dalam persiapan dan penyelenggaraan oleh segenap aparatur pelaksana dari tingkat pusat maupun daerah. Disamping itu berkat peran aktif dari organisasi peserta pemilu pada khususnya dan segenap lapisan masyarakat pada umumnya. Hal demikian menjadi indikator bahwa rakyat telah menyadari perannya. Dari sini diharapkan,tingkat kesadaran masyarakat juga akan meningkat lagi pada Pemilihan Umum 2019 nanti.

Mengenai pendidikan politik masyarakat dapat diketengahkan secara sederhana pendidikan politik pada hakekatnya dikatakan sebagai pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga pada gilirannya nanti masyarakat akan mempunyai kelanjutan pemikiran untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk didalamnya pembangunan politik yang antara lain teraktualisasi dalam penyelenggaraan umum. Pendidikan politik yang dimaksudkan meliputi sedikit banyaknya informasi masalah-masalah kenegaraan yang diterima masyarakat. Selanjutnya, pendidikan politik yang diterima oleh

masyarakat melalui dua cara penyampaian, 58ransfer dan eksplisit. Penyampaian secara 58ransfer adalah penyampaian informasi masalah politik/kenegaraan bersamaan dengan materi lain, sedangkan yang eksplisit adalah penyampaian informasi politik/kenegaraan tidak bersamaan dengan materi lain diluar informasi politik.

Sebenarnya tanpa usaha dan terencanaupun, yang dinamakan proses penyadaran hak dan kewajiban sebagai warga 58ransf dan anggota masyarakat berjalan dengan sendirinya. Hal tersebut dapat dikaji lebih lanjut, dalam lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan masyarakat pada umumnya terjadi interaksi sosial. Dan didalam interaksi tersebut terjadilah 58ransfer informasi, nilai dan praktek politik yang mendasari kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan kenegaraan. Orang juga belajar politik dari pengalaman empiris yang setiap hari diperoleh dalam praktek hidup bermasyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dalam hubungannya dengan ruang lingkup permasalahan, peneliti akan merumuskan masalah yang merupakan penetapan obyek penelitian. Dengan perumusan masalah ini akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahasan masalah.

Dari uraian diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara diKabupaten Tulungagung?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara diKabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara diKabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara diKabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Agar hasil penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh lembaga atau instansi

lain sebagai bahan pertimbangan pembuat kebijakan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Sosialisasi Politik

Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Berger (dalam Sutaryo, 2005) bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam suatu proses politik, sosialisasi politik menjadi suatu hal yang penting karena terdapat keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi dalam sebuah proses politik. Menurut Almond dan Verba, dalam Zuhri (2010), secara luas sosialisasi politik merupakan transmisi dari budaya politik kepada generasi yang baru di suatu masyarakat tertentu. Definisi yang hampir serupa juga diungkapkan pula oleh Mas'ood (2008), yang mengungkapkan bahwa sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Dengan sosialisasi politik suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan

keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya, proses ini disebut transmisi kebudayaan. Sosialisasi politik merupakan produk dari fenomena mikro dan makro yang saling bertautan. Pertanyaan mendasar pada level makro dalam penelitian sosialisasi politik adalah bagaimana masyarakat politik mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan pendapat-pendapat serta perilaku kepada masyarakat? Studi sosialisasi politik pada level mikro mempertanyakan: bagaimana dan mengapa orang-orang menjadi warga negara? Pada level makro sistem politik, sosialisasi politik merupakan alat yang digunakan masyarakat politik untuk menanamkan norma-norma dan praktik-praktek yang tepat kepada warganya. Sedangkan pada level mikro, sosialisasi politik merupakan pola-pola dan proses yang dilalui individu dalam melibatkan diri dalam pembangunan dan pembelajaran politik, membentuk konteks yang khusus dengan lingkungan politik tempat tinggalnya (Sapiro, 2004). Pengertian sosialisasi politik menurut Wright (dalam Sutaryo, 2005) adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Menurut Koirudin (2004) sosialisasi politik adalah

proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Setiap masyarakat mempunyai cara-cara untuk mensosialisasikan penduduknya di dalam kehidupan politik. Biasanya proses sosialisasi berjalan berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa. Greenstein (dalam Rush dan Althoff, 2008) menjelaskan pengertian sosialisasi politik dalam arti sempit dan luas, yaitu: (1) Dalam arti sempit adalah penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab. (2) Sedangkan dalam arti luas adalah semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan. Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai - nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi. Menurut David Easton dan Jack Dennis (dalam Rush dan Althoff, 2008),

sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya. Sosialisasi politik menurut Syarbaini, dkk. (2004) adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Jenis-Jenis Sosialisasi Politik
Terdapat berbagai jenis sosialisasi politik, dan apabila dikaitkan dengan prosesnya sosialisasi dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu: (1) Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak. (2) Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. (Susanto, 2012). Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat

sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan, dan diatur secara formal. Sedangkan berdasarkan tipenya, jenis-jenis sosialisasi oleh Syarbaini, dkk. (2004) dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. (2) Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum.

B. Pendidikan Politik

Menurut A. Sudiharto Djiwandono : 2005, latar belakang pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan mengapa istilah pendidikan politik disebut secara eksplisit adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang bersifat edukatif, agar gambaran umum tentang politik sebagai sesuatu yang kotor yang bersifat polusi, penuh pertentangan dan sebagainya itu, makin lama makin terhapus dan di masyarakat tumbuh pengertian yang wajar dan sehat tentang politik. Orang tidak perlu takut politik dan menjahui politik, karena sadar atau tidak, mau atau tidak mau, setiap warga negara dari suatu negara sebenarnya terus menerus terlibat dalam politik. Kehidupan kenegaraan pada dasarnya adalah kehidupan politik.
2. Untuk memberikan tekanan bahwa peningkatan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan perkataan lain peningkatan kesadaran politik rakyat, perlu dilakukan melalui usaha sadar dan terencana, dalam hal ini melalui kegiatan pendidikan, sehingga lebih efektif dan lebih menjamin tidak terjadinya penyimpangan yang pernah terjadi dimasa lalu.

Menyimak pertimbangan-pertimbangan diatas, dapatlah diketahui bahwa ditengah-tengah masyarakat kita

terdapat pengertian yang kurang wajar dan kurang sehat tentang politik. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha sadar supaya pemahaman kehidupan negara yang pada dasarnya adalah kehidupan politik mendapat tempat semestinya, sehingga rakyat semakin sadar. Usaha itu melalui pendidikan politik.

Kesadaran adalah suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap suatu hal, politik segala hal ikhwal tentang negara. Jadi kesadaran politik berarti suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap segala hal ikhwal negara. Berarti masyarakat harus lebih tanggap terhadap hal ikhwal kenegaraan.

C. Partisipasi Politik Masyarakat

Secara sederhana istilah partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang, kelompok orang atau masyarakat dalam suatu kegiatan. Berkenaan dengan definisi politik, secara umum Miriam Budiarto mengatakan :

“Politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”.

Jika antara istilah partisipasi dan politik disatukan, maka membentuk konsep baru yakni partisipasi politik, yakni keikutsertaan atau pelibatan seseorang, kelompok orang atau masyarakat dalam

kegiatan negara/sistem politik yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem itu. dalam hal ini perlu kiranya memperhatikan pendapat-pendapat para pakar politik mengenai partisipasi politik yang pertama adalah pendapat Miriam Budiarto (2002) yang memberikan definisi dan kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik adalah :

“Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan”.

Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama, untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawatahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat, dalam hal ini dimanifestasikan melalui pemilihan umum. Dan keterlibatan masyarakat sebagai warga negara telah memnuhi syarat (para pemilih) ,pada

suatu tahap atau beberapa tahap kegiatan dalam pemilu itulah yang disebut dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana demokrasi, untuk membentuk sistem kekuatan yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung dimana situs penelitiannya adalah KPUD Kabupaten Tulungagung.

C. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara dan dokumentasi.

E. Tehnik Analisa Data

Analisa yang dipergunakan apabila data yang diperoleh adalah analisa data kualitatif yaitu merupakan suatu analisa dari data-data yang tidak berwujud angka-

angka untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berpedoman pada data yang berbentuk angka dan dapat disusun dalam bentuk tabel, kemudian melakukan analisa dari data tersebut.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten

Tulungagung

Letak geografis Kabupaten Tulungagung berada pada posisi $111^{\circ} 43^{\circ}$ – $112^{\circ} 07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 51^{\circ}$ – $8^{\circ} 18^{\circ}$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung meliputi 1.055.65 km² atau sekitar 2,2% dari luas wilayah propinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas wilayah kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

Seperti daerah lain di Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung memiliki iklim tropis, dipengaruhi oleh curah hujan yang sangat besar. Tulungagung sering disebut sebagai “ Kota Banjir “ karena seringnya mengalami banjir dari tahun ke tahun (banjir tahunan). Namun sejak

dioperasikannya terowongan Neyama dan Parit Raya sejak tahun 1992, maka kota Tulungagung bebas dari banjir tahunan tersebut.

Secara administratif Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 wilayah kecamatan, terdiri atas 257 desa dan 14 kelurahan. Wilayah kecamatan di Tulungagung tersebut terdiri dari:

- Kecamatan Kedungwaru
- Kecamatan Tulungagung
- Kecamatan Boyolangu
- Kecamatan Ngantru
- Kecamatan Campurdarat
- Kecamatan Besuki
- Kecamatan Pakel
- Kecamatan Bandung
- Kecamatan Kauman
- Kecamatan Gondang
- Kecamatan Karangrejo
- Kecamatan Sendang
- Kecamatan Pagerwojo
- Kecamatan Ngunut
- Kecamatan Sumbergempol
- Kecamatan Rejotangan
- Kecamatan Kalidawir
- Kecamatan Pucanglaban
- Kecamatan Tanggunggunung

Jumlah penduduk kota Tulungagung menurut sensus penduduk yang diadakan tahun 2000 berjumlah 934.864 terdiri atas 462.607 laki-laki dan 472.257 perempuan. Sementara itu apabila dilihat dari klasifikasi kelompok umur, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Komposisi Penduduk Menurut Umur Tahun 2017

Umur (tahun)	Prosentase (%)
0 – 4	7,89
5 – 9	10,59
10 – 14	11,44
15 – 25	10,44
26 – 55	45,80
> 55	14,22
Jumlah	100,00

Sumber: Kantor Biro Pusat Statistik Tulungagung

Dari komposisi penduduk sebagaimana yang tertera dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Tulungagung terdiri atas penduduk usia sekolah. Hal ini mendorong Pemda Tulungagung melakukan pembangunan fasilitas pendidikan diberbagai pelosok daerah, sehingga mayoritas penduduknya adalah penduduk yang bisa membaca dan menulis. Hal ini juga sebagai bukti bahwa Pemda Tulungagung ikut mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Buta Huruf.

B. Gambaran Umum Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

1. Sejarah KPU Kabupaten Tulungagung

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16

Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturanperundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

VISI :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggara-an pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Bentuk – bentuk sosialisasi politik.

Sosialisasi yang dilaksanakan pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan berbagai macam cara. Beberapa partai politik melakukan strategi yang berbeda-beda dalam melakukan sosialisasi politik. Ada yang memakai selebaran dan brosur ataupun kampanye melalui berbagai media baik media cetak maupun visual. Pada Kabupaten Tulungagung hampir semua partai politik melakukan sosialisasi melalui kampanye. Dalam hal ini partai politik sebagai suatu organisasi politik juga bisa memberikan informasi ataupun pendidikan politik secara formal melalui kaderisasi, ceramah politik dan santiaji pemilu kepada masyarakat luas.

Bentuk lain dari sosialisasi politik secara informal yakni praktek-praktek politik secara implisit melalui keluarga, teman bermain, sekolah dan organisasi kemasyarakatan serta media massa.

Kaderisasi dan ceramah politik lebih efektif bila digunakan pada saat mendekati waktu penyelenggaraan pemilihan umum. Intensitas dan kontinuitas dari kegiatan ini berimplikasi bahwa masyarakat akan makin kenal dan terpengaruhi terhadap bentuk sosialisasi

tersebut. Berikut wawancara dengan salah satu calon pemilih dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Tulungagung,,

“Kaderisasi anggota partai politik sangat efektif untuk mengumpulkan massa akan tetapi hal tersebut tidak cukup untuk mendulang suara yang banyak tanpa dilakukan ceramah politik dan pendekatan sosial kepada masyarakat luas, terkadang masyarakat awam tidak tahu siapa dan bagaimana visi, misi ataupun profil dari calon dan partai politik yang ada”

Wawancara dengan bu Maryanti (PNS).

Senada dengan pendapat tersebut diatas menurut Djasmadi (pensiunan PNS) dan Abdul Ghofar (Swasta) :

“Proses sosialisasi ataupun pendidikan politik yang dilakukan mendekati dengan waktu pelaksanaan itu lebih ampuh ketimbang proses sosialisasi secara informal, masyarakat akan mudah mencerna proses pendidikan maupun sosialisasi melalui santiaji pemilu dan kampanye-kampanye politik. Akan tetapi proses belajar mengenai informasi secara informal juga perlu diterapkan sejak dini sehingga ketika pemilu akan dimulai masyarakat sudah siap dengan pilihan – pilhan yang sesuai dengan naluri serta harapan mereka”

Berbeda dengan kedua pendapat diatas menurut Lila Zulaikah (PNS): “sosialisasi politik secara informal juga mampu memberikan dorongan terhadap

anak-anak sehingga respon adaptif mereka sejak dini bisa terasah melalui pendidikan disekolah maupun keluarga.”

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk sosialisasi politik secara formal lebih efektif untuk diimplementasikan dibandingkan dengan bentuk sosialisasi politik secara informal walaupun pendidikan secara informal mengenai politik itu seharusnya diterapkan sejak anak usia dini sehingga ketika anak menjelma menjadi seorang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sudah siap akan keputusan yang nantinya mereka akan ambil karena konsekuensi dari suara seseorang bisa berpengaruh terhadap hasil dari pemilihan umum.

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi sosialisasi politik.

Dalam pelaksanaannya sosialisasi politik memerlukan kontinuitas dan keseriusan dari pihak yang bersangkutan seperti partai politik ataupun calon legislatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu sosialisasi politik. Faktor tersebut diantaranya : tingkat pendidikan, ketepatan waktu (*timely*), komunikasi.

1) Tingkat pendidikan.

Jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang mampu mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Didalam proses sosialisasi politik tingkat pendidikan seseorang akan

tampak memudahkan orang tersebut dalam menerima sosialisasi politik dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang maksimal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu orang yang pernah ikut sosialisasi politik Fahrudin Yuni (swasta) :

“Seperti saya yang lulusan Sarjana sudah tidak asing lagi dengan partai politik dan bentuk – bentuk kegiatan politik, saya juga pernah mengikuti sosialisasi politik dari salah satu calon legislative, bagi saya sosialisasi ini sangat perlu disampaikan kepada semua lapisan masyarakat tidak pilih-pilih, lain hal dengan tetangga saya yang hanya lulusan SMP, rata – rata mereka dengan berbagai alasan akan malas untuk mengikuti sosialisasi politik, dengan dalih siapa saja yang memimpin toh hasilnya bagi mereka tidak aka nada efek baiknya. Padahal dengan sosialisasi ini masyarakat akan mampu mengetahui dan memahami siapa calon wakil ataupun pemimpin mereka yang akan datang”.

Hal senada juga disampaikan Nyadin, S.Ag anggota KPU kabupaten Tulungagung :

“tingkat pendidikan seseorang akan memotivasi orang tersebut untuk mau menambah pengetahuan seperti mengikuti sosialisasi politik baik yang diadakan partai politik maupun calon legislative, hal ini bertujuan agar pada saat pemilihan berlangsung pemilih tetap

tidak ragu bahkan buta terhadap apa yang mereka pilih. Selain itu pendidikan informal seperti dari sekolah maupun keluarga mengenai kegiatan-kegiatan politik sangat bermanfaat pada saat seseorang bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu”

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi dalam proses sosialisasi politik. Pernyataan tersebut diatas menggambarkan bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi seseorang yang ingin menambah wawasan dan mengasah kemampuannya dalam berbangsa dan bernegara.

Sama dengan penuturan beberapa orang yang terdaftar menjadi daftar pemilih tetap sebagai berikut : “menurut lila zulaikah , saya bentuk kampanye melalui media visual seperti televise lebih efektif karena penyampaian informasi menggunakan bahasa yang baik dan benar akan lebih mudah dimengerti”

2) Ketepatan waktu (*timely*).

Sosialisasi politik dengan bentuk penyampaian formal seperti kampanye dan ceramah politik merupakan media yang sangat efektif untuk dilakukan dalam proses pemilihan umum, S.Ag sebagai panwaslu Pileg Kabupaten Tulungagung tahun 2019 :

“Waktu yang disediakan oleh KPU kepada partai politik maupun calon legislative merupakan momentum yang

sangat berharga terutama dalam sosialisasi politik, akan tetapi ada kalanya partai maupun caleg. yang mencuri waktu start dalam melakukan kampanye – kampanye (*black campaign*) dengan tegas kami panwaslu akan menindak tegas partai maupun calon legislative yang melanggar ketentuan waktu tersebut, oleh karenanya ketepatan waktu bagi suatu partai politik maupun calon legislative dalam melakukan sosialisasi akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari proses pemungutan suara yang akan dilakukan sehingga juga tidak dipungkiri banyak parpol yang mencuri start waktu kampanye”.

Salah satu anggota panwaslu Imam Tukiranto berpendapat :

“Pemanfaatan waktu yang maksimal akan membawa hasil yang baik, oleh karenanya *timing* yang tepat sangat perlu dimanfaatkan bagi partai politik maupun calon legislative dengan kata lain seperti pepatah waktu itu sangat berharga bagi mereka khususnya partai politik maupun caleg”.

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa waktu juga memberikan pengaruh terhadap proses Menurut pendapat Mukti Ali sosialisasi politik.

3) Komunikasi.

Faktor lain yang juga sangat penting adalah komunikasi. Komunikasi merupakan sarana yang harus digunakan

dalam melakukan sosialisasi. Komunikasi bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dalam proses sosialisasi kedua cara ini terbukti paing efektif untuk diterapkan. Sebagaimana pendapat Maryanti (PNS) :

“Dimanapun tidak ada sosialisasi politik yang tidak menggunakan komunikasi. Komunikasi yang baik perlu disampaikan secara jelas, ringkas dan tegas sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima penerima informasi secara mudah, oleh karenanya sosialisasi politik perlu disampaikan menggunakan bahasa komunikasi yang baik sehingga hasil yang didapatkan juga maksimal.”

Senada dengan pendapat diatas Achmad Nafik salah satu anggota panwaslu pemilu 2019 Kabupaten Tulungagung menyatakan :

“Dari tahun ketahun komunikasi adalah senjata paling efektif untuk mendapat suara yang banyak dalam pemilihan umum, komunikasi merupakan kunci untuk sukses tidaknya suatu partai politik maupun calon legislative dalam memperoleh suara yang maksimal.”

Beberapa pendapat diatas menggambar kan bahwa komunikasi merupakan faktor utama yang bisa mensukseskan sosialisasi politik. Ketiga faktor tersebut diatas ternyata mampu mempengaruhi proses sosialisasi politik bagi masyarakat. Akan tetapi melihat ketiga faktor tersebut komunikasi merupakan faktor yang

sangat penting dibandingkan kedua faktor yang lain mesti tidak dipungkiri tingkat pendidikan dan ketepatan waktu juga mempengaruhi terhadap sukses tidaknya suatu sosialisasi politik. Hal ini terbukti dari pendapat – pendapat dan data yang diperoleh dalam pengamatan oleh peneliti.

KESIMPULAN

1. Dari keterangan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat bahwa sosialisasi politik dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Ada sosialisasi politik yang formal melalui ceramah politik, kaderisasi maupun santiaji politik. Yang kedua ada sosialisasi politik secara informal yakni melalui pendidikan sekolah, keluarga teman maupun lingkungan.
2. Faktor–faktor yang berpengaruh terhadap sosialisasi politik anatar lain : tingkat pendidikan, ketepatan waktu (*timely*), komunikasi. Dari hasil pengamatan dilapangan komunikasi merupakan faktor kunci sukses tidaknya suatu sosialisasi politik. Akan tetapai kedua faktor yang lain seperti tingkat pendidikan dan ketepatan waktu juga mempengaruhi sosialisasi politik kepada masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berkenegaraan.

SARAN

1. Bagi partai politik maupun calon legislative hendaknya perlu memaksimalkan waktu dan komunikasi yang efektif sehingga sosialisasi politik bisa berjalan dengan sukses.
2. Panwaslu dan KPU harus tegas menindak setiap pelanggaran pada sosialisasi politik yang diadakan setiap partai politik maupun calon legislative seperti mencuri start kampanye.

Panggabean M., 2003, *Pendidikan Politik, Obor*, Jakarta,

Sutaryo. 2005. *Dasar-dasar sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Sutrisno Hadi, 2004, *Statistik Jilid II, Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta, 1975. *Metodologi Reserch II*,

Sudiharto Djiwandono A., 2005. *Psikologi Politik*, Mandar maju, Bandung,

Syarbaini, S. dkk. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Arbi Sanit, Swadaya *Politik Masyarakat*, Rajawali, Jakarta

Hadari Nawawi, 2005, *Administrasi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta,.

Huntington, Samuel P dan Joan M Neelson, Hasan Basri Penterjemah, 2000, *Partisipasi Politik*, PT. Sangkala Pulsar, Jakarta,

Kenneth P. Latingthon, 2002, *Politic Culture, (terjemahan)* New York Ekspres,

Kerlinger, Fred N dan Elazar J Pedhatur. Ataufik, 1987. Penerjemah, *Korelasi dan Analisa Regresi Ganda*, Nur Cahya, Semarang,

Mas'oeed, M. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univerity Press.

Miriam Budiardjo, 2002. *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta,

Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yayasan Obor, Jakarta,.